

Maahud MD dan Menaker Dukung Percepatan Pengesahan RUU PPRT

JAKARTA (IK) - Menko Polhukam Maahud MD dan Menaker Ida Fauziah mendukung percepatan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

Pernyataan dukungan percepatan dan pengesahan RUU PRT disampaikan Maahud dan Ida Fauziah, saat acara gerak jalan Car Free Day (CFD) di Sudirman-Thamrin, Jakarta, Minggu (12/1).

Puluhan peserta gerak jalan mulai berkumpul di Stasiun Dukuh Atas pada pukul 07.15 WIB.

Terlihat dalam acara ini, Menko Polhukam Maahud MD, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiuro, beserta jajaran komisioner Komnas

HAM lainnya, Abdul Haris Semendawai, Pramono Ubaid Tantowi, dan Anis Hidayah.

Terlihat, rombongan tampak mengenakan pakaian berwarna putih saat gerak jalan.

Mereka tetap melaksanakan gerak jalan walaupun kondisi cuaca di lokasi hujan gerimis.

Beberapa di antara peserta lainnya yang berasal dari Komnas HAM, KPAI, Kemen PPA, hingga masyarakat sipil juga turut membawa barang seperti serbet dan teflon yang menunjukkan PRT.

Usai melakukan gerak jalan, Menkopolkahum dan rombongan lainnya nampak duduk di sebuah tenda untuk mengeluarkan aspirasinya untuk mendukung RUU ini. ● me

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Petugas KPU Kota Serang (kiri) menyerahkan kartu pemutakhiran data pemilih kepada Wali Kota Serang Syafrudin (kanan) di Serang, Banten, Minggu (12/2). Para petugas KPU secara serentak melakukan pencocokan dan penelitan data pemilih untuk pemutakhiran data mulai tanggal 12 Februari hingga 14 Maret 2023.

Sandiaga Uno Kembali Tanggapi Rumor Kepindahannya ke PPP

GOWA (IM) - Rumor Sandiaga Uno akan menyeberang dari Partai Gerindra ke PPP, kembali mencuat. Rumor ini semakin santer karena Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Memparekraf) itu kerap hadir dalam acara yang digelar PPP.

Hanya saja, Sandiaga tak mau menjawab secara gamblang terkait kemungkinannya untuk loncat partai.

Saat hadir dalam acara jalan sehat dalam rangka Harlah PPP di Malino, Gowa, Sandi menjelaskan bahwa terkait kepindahannya akan menjadi keputusan pimpinan partai.

“Itu (kepindahan) tentunya putusan dari pimpinan. Sebagai kader saya hormat dan tegak lurus kepada arahan pimpinan. Memang itulah fatsun politik,” kata

Sandiaga, Minggu (12/2).

Disinggung terkait tiket sebagai Capres jika nantinya benar-benar bergabung dengan PPP, Sandiaga kembali menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan partai politik.

Apalagi, jelas dia, untuk penentuan itu nantinya berdasarkan kesepakatan gabungan partai politik.

“Yang akan mengambil keputusan itu adalah partai politik dan gabungan partai politik. Tentunya sebagai kader, ya patuh. Kontestasi demokrasi tinggal hitungan bulan tentunya komunikasi dan konsolidasi serta koordinasi antara partai politik ini, pada saatnya nanti teman-teman bisa berkoordinasi dengan pimpinan kami,” ujar Sandiaga Uno. ● han

Satgas Yonif 143/TWEJ Latih Siswa SMA di Perbatasan

JAKARTA (IM) - Satgas Yonif 143/TWEJ bersama anggota Koramil 1715-05 Okbibab, melatih pelajar SMAN Okbibab baris berbaris dalam rangka membentuk karakter disiplin dan kekompakan, di Kampung Okbibab, Distrik Okbibab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, Sabtu (11/2).

Pengetahuan keterampilan tentang baris berbaris, dinilai sangat perlu diberikan terhadap semua tingkatan siswa sekolah untuk membekali sekaligus membentuk karakter disiplin dan loyal. Sebab, anak-anak kelak yang akan meneruskan cita-cita bangsa.

Dansatgas Yonif 143/TWEJ Letkol Inf Ari Iswoyo Timor, menjelaskan, peraturan baris berbaris merupakan suatu metoda pembelajaran untuk membentuk sifat dan karakter disiplin, loyal serta memupuk kekompakan atau kebersamaan.

“Kita berikan latihan baris berbaris guna membentuk karakter siswa yang disiplin, taat dan kompak,

ini perlu diberikan sebagai bekal mereka kedepan,” ungkap Dansatgas.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satgas Yonif 143/TWEJ Pos Okbibab yang bekerjasama dengan Koramil setempat sebagai bentuk kepedulian terhadap generasi muda penerus bangsa, dimana siswa harus memiliki semangat dan disiplin tinggi serta berawasan kebangsaan.

Dipimpin langsung oleh Danpos Okbibab Letda Inf Briyant Purba Wisesa, S.Tr (Han), latihan tersebut mendapat sambutan hangat dari pihak sekolah, di mana para siswa mengakui pembekalan mengenai peraturan baris berbaris sangat penting diberikan, dikarenakan keterbatasan pengajar akan pengetahuan tersebut masih kurang maka jarang dilatihkan.

“Terimakasih bapa TNI, Sa senang sekali dilatih berbaris oleh bapa TNI ternyata ini latihan yang menyenangkan,” ucap salah seorang guru SMAN Okbibab, Elis Marani. ● me

KontraS: Wakil Ketua DPR Sebut “Papua Darurat Sipil” Sangat Berbahaya

JAKARTA (IM) - Pernyataan Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Paulus yang menyebut situasi Papua dalam status darurat sipil, dinilai sangat berbahaya.

Pernyataan anggota dewan tersebut menyusul soal pembakaran pesawat Susi Air yang diduga dilakukan Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNBP-OPM).

Komis untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mempertanyakan dasar pernyataan Lodewijk itu. Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti, menegaskan, hingga saat ini tidak pernah ada keputusan resmi dari Presiden RI Joko Widodo terkait status operasi ke-

amanan di Papua.

Ia mengingatkan bahwa penyelesaian masalah dengan pendekatan keamanan, seperti darurat sipil, tidak akan dapat menyelesaikan konflik yang selama ini terjadi di Papua.

“Kami menilai, pernyataan tersebut sangatlah berbahaya, sebab dapat memicu eskalasi kekerasan dan dapat memperparah situasi kemanusiaan di Papua,” kata Fatia lewat keterangan tertulis yang diterima wartawan, Minggu (12/2).

“Dikhawatirkan pernyataan Wakil Ketua DPR itu dijadikan validitas oleh aparat keamanan untuk melakukan tindakan yang berlebihan dan sewenang-wenang. Sebab melalui kebijakan darurat sipil negara memiliki wewenang yang begitu besar dan berpo-

Pembentukan Kodam di Semua Provinsi di Indonesia Dipertanyakan Urgensinya

Penambahan Kodam bisa-bisa saja dilakukan, tapi dikhususkan untuk wilayah yang memiliki karakteristik ancaman tinggi, seperti Papua.

JAKARTA (IM) - Anggota Komisi I DPR Dave Laksono menilai rencana pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) baru perlu dilakukan secara matang dan harus benar-benar bermanfaat. Dave mencatat sejumlah hal yang perlu diperhatikan sebelum Kodam baru di beberapa provinsi dibentuk.

“Pembentukan unit atau instalasi militer baru dengan size yang cukup besar, tentunya membutuhkan biaya yang besar. Baik pembangunan gedungnya, persiapan personalnya hingga operasionalnya,” kata Dave saat dihubungi wartawan, Minggu (12/2).

Pembentukan Kodam baru harus dilihat kebutuhannya secara seksama. Kodam baru harus bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

“Agar kehadiran Kodam

di tiap provinsi memiliki dampak yang besar dalam menjaga kedaulatan bangsa,” jelasnya.

Ditanya apakah pembentukan Kodam baru dirasa penting di masa sekarang, Dave enggan memberikan komentar. Sebab, hal itu menujurnya hanya bisa dijawab oleh pemerintah dan instansi TNI.

Sementara Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran Prof Muradi, justru mempertanyakan urgensi dari rencana TNI Angkatan Darat (AD) yang ingin melengkapinya Markas Komando Daerah Militer (Kodam) di semua provinsi di Indonesia.

Ia menilai tidak ada urgensi yang mengharuskan pembentukan Kodam di semua provinsi.

“Saya sih enggak lihat

urgensinya malah. Makanya kemudian itu agak aneh,” ujar Muradi saat dihubungi wartawan, Minggu (12/2).

Muradi menjelaskan, penambahan Kodam sebenarnya bisa-bisa saja dilakukan. Hanya, seharusnya, pembentukan Kodam itu dilakukan di wilayah yang memiliki karakteristik ancaman tinggi, misalnya seperti Papua. Atau, kata Muradi, Kodam juga bisa dibentuk di Nusa Tenggara Timur (NTT) karena berbatasan dengan Timor Leste.

Selain di daerah yang dia sebut di atas, menurut Muradi, tidak perlu lagi ada pembentukan Kodam. Sebab, pada dasarnya, pengamanan wilayah berada di bawah tanggung jawab kepolisian, bukan TNI. Terlebih, metode perang yang saat ini berlaku sudah berubah menjadi perang siber.

“Kalaupun kemudian dipaksakan, sekarang pertanyaannya adalah mereka akan seperti apa? Apakah akan kembali ke model lama dengan perkuat teritorial? Sementara perangnya sudah

berubah bergeser dari perang konservatif, normatif, bergeser yang mengarah pada kekuatan yang siber, dan sebagainya. Ancamannya sudah berbeda. Jadi kalau kemudian dipaksakan, ya untuk apa?” katanya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengatakan, pendirian Kodam akan direalisasikan. Termasuk, untuk empat daerah otonomi baru (DOB) di Papua, yakni Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan.

“Kan (keseluruhan) ada 38 provinsi. (Jumlah) Kodam sekarang 15. Ini sama ada mungkin (untuk) provinsi baru ya,” ujar Prabowo di

Langud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (11/2).

Ke-15 Kodam yang saat ini sudah ada, antara lain Kodam I/Bukit Barisan, Kodam II/Sriwijaya, Kodam III/Siliwangi, Kodam V/Brawijaya, Kodam VI/Mulawarman, Kodam IX/Udayana, dan Kodam XII/Tanjungpura. Kemudian, Kodam XIII/Merdeka, Kodam XIV/Hasanudin, Kodam XVI/Pattimura, Kodam XVII/Cenderawasih, Kodam XVIII/Kasuari, Kodam Jayakarta, dan Kodam Iskandar Muda.

Merujuk dari jumlah tersebut, maka akan ada 23 Kodam lagi yang akan dibentuk untuk melengkapi di 38 provinsi. ● han

KBRI dan KJRI telah Beri Pendampingan kepada 67 WNI yang Ditangkap di Malaysia

JAKARTA (IM) - Pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johar Baru, telah mendampingi 67 WNI yang ditangkap di Malaysia. Mereka ditangkap terkait perkampungan ilegal yang dihuni para WNI tersebut.

“KBRI Kuala Lumpur dan KJRI Johar Bahru telah mendampingi para WNI tersebut,” ujar Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Judha Nugraha mengatakan, Minggu (12/2).

Duta Besar (Dubes) RI untuk Malaysia dan Konsul Jenderal (Konjen) RI di Johor Bahru sudah bertemu langsung dengan 67 WNI tersebut.

Adapun 67 WNI itu ditahan di Detensi Imigrasi Lengeng, Negeri Sembilan. “Selanjutnya KBRI dan KJRI akan beri pendampingan hukum untuk memastikan terpenuhinya hak-hak para WNI,” ucapnya.

Puluhan WNI itu hingga saat ini masih belum dibebaskan. Namun, mereka sudah dalam pendampingan.

Direktur Jenderal Departemen Imigrasi Malaysia (JIM) Khairul Dzaimed Daud mengatakan, warga Indonesia yang berada di perkampungan ilegal tersebut diyakini tidak berniat kembali, melainkan pengekakan hukum dilakukan di sana termasuk upaya prioritas di mana mencari pilot statusnya seperti apa. Apakah beliau ditemui di kawasan Istora Senayan, Jakarta, Jumat (10/2).

“Tentunya operasi intelijen dilakukan dan tentunya DPR ya, dalam hal ini kita mendorong penegakkan hukum dilakukan di sana termasuk upaya prioritas di mana mencari pilot statusnya seperti apa. Apakah beliau ditemui di kawasan Istora Senayan, Jakarta, Jumat (10/2).”

Dalam Operasi Penegakan Terpadu yang dilakukan pengekak hukum Malaysia, ada 68 WNI yang diperiksa di mana 67 di antaranya ditahan karena berbagai pelanggaran, termasuk tidak memiliki dokumen identitas yang sah dan *overstay*.



PELANTIKAN DAN APPEL KESIAPAN PANTARLIH SE KOTA PALEMBANG Walikota Palembang Harnojoyo (tengah) memakaikan atribut kepada Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) Pemilu 2024 saat pelantikan dan Apel Kesiapan Pantarlih se Kota Palembang di Plaza Stadion Gelora Sriwijaya (GSJ), Jakabaring Sport City (JSC), Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (12/2). Sebanyak 4.765 petugas Pantarlih se-Kota Palembang akan melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih 2024 yang akurat dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

PENGUMUMAN PEMBARUAN PT TOMS MEDIA SERVICE ASIA (“TELAH LIKUIDASI”)

Berdasarkan akta tanggal 10 Februari 2023, No.: 04, dibuat dihadapan HUKUMI (RIZKI SRI WIJO, Notaris, PT TOMS MEDIA SERVICE ASIA (“Telah Likuidasi”) (Perseroan), berkedudukan di Kabupaten Tangerang, dengan ini mengumumkan:

- Mengetujui segala tindakan pengurusan/pembayaran yang dilakukan likuidator dalam likuidasi Perseroan;
- Pengesahan perhitungan hasil likuidasi Perseroan, dan membatalkan persetujuan/pembayaran yang dilakukan oleh likuidator;
- Pembentukan dengan hormat dan membatalkan pembatasan, pembatasan dan pelepasan tanggung jawab (copout or discharge) atas segala tindakan/tindakan yang telah dilakukan oleh likuidator dalam rangka likuidasi Perseroan, sekaligus membatalkan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan membatalkan pembatasan, pembatasan dan pelepasan tanggung jawab (copout or discharge) atas segala tindakan/tindakan yang telah dilakukan oleh mereka selama masa jabatan mereka.

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal pengumuman ini.

Pengumuman ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan yaitu Pasal 152 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

13 Februari 2023
LIKUIDATOR PT TOMS MEDIA SERVICE ASIA (“Telah Likuidasi”)
Yusuf Kobayashi